

■ Cari Angin

Nyanyian Gayus

Putu Setia

Ada berita apalagi di negeri ini? Itulah pertanyaan awal Romo Imam ketika saya berkunjung sore hari. Saya jawab, "Angin masih kencang di laut, nelayan tak bisa melaut. Perahu dan rumah mereka hancur diterjang ombak. Banjir lahar dingin masih mengancam, angin ribut juga menerjang beberapa wilayah. Sepertinya pemerintah daerah kewalahan kalau pemerintah pusat tak turun tangan."

Romo tertawa. "Jangan tunggu pemerintah pusat, mereka masih sibuk mengurus Gayus Tambunan. Sudah sampai di mana kasus ini?"

"Seputar perang pernyataan antara Gayus dan Denny Indrayana," jawab saya. "Menurut Romo, siapa yang bohong?"

"Serahkan kepada tokoh lintas agama, mereka bisa memutuskan yang mana bohong. Mereka sudah berhasil menyimpulkan kebohongan pemerintah, urusan Gayus dan Denny pasti kecil."

Saya diam, belum bisa menebak ke mana arah pikiran Romo. "Kalau soal hebat-hebatan, Gayus tentu lebih hebat dibanding Denny, bahkan dibandingkan dengan seluruh anggota Satgas, sampai menteri sekalipun. Gayus ibarat toko senapan, orang bisa memesan berbagai jenis peluru di sana, tergantung siapa yang akan dilumpuhkan. Ia bisa menyebut banyak nama. Bakrie, Ical, Denny, Cirus, Antasari, mungkin lain kali Bambang Pamungkas, Nurdin Halid, Tukul, ya, siapa saja. Mau pakai CIA, neolib, teri, paus, *wong cilik*, semuanya bisa diramu."

Saya masih diam dan Romo meneruskan, "Negeri nun jauh seperti Guyana pun sudah dilibatkan. Ingat, Gayus 68 kali keluar dari tahanan Brimob dan polisi baru menemukan dua perjalanannya, ke Bali dan ke Makau. Masih ada kemungkinan 60 lebih perjalanan. Bisa saja ke Aceh, India, Palestina, yang jelas tidak ke neraka."

Saya ikut tertawa. Romo melanjutkan, "Tugas Gayus hanya menyanyi sesuai dengan pesanan, tak peduli teknik berbohongnya dangkal, misalnya, ada agen CIA kok begitu terbuka sama dia. Pemesannya yang kemudian menyulap nyanyian Gayus seolah-olah semuanya benar dengan berbagai teori, entah itu teori konspirasi atau teori kentut. Maaf yang terakhir ini agak jorok."

"Teori jorok itu seperti apa, Romo?" saya penasaran. "Ada bermacam-macam kentut. Ada kentut yang bau sekali tapi tak ada suaranya, ada kentut yang bunyinya keras tapi tidak bau, ada kentut yang tak berbunyi dan tak berbau tapi orangnya jadi salah tingkah karena menahan kentut, bisa mendadak gagap atau mukanya tak lagi cerah. Teori ini tak usah dibahas," kata Romo.

Yang menyebabkan kasus ini semakin ramai dan berlele-tele, kata Romo Imam lagi, semua orang bebas berkomentar. Tak harus tahu masalah, yang penting berkomentar dan bisa masuk TV. Celakanya, komentar itu bisa mengganggu tugas penegak hukum karena komentar asal-asalan itu dikomentari lagi. Mestinya ditinggalkan saja, tapi terus bekerja. Selebihnya adalah kita punya presiden yang kupingnya tipis, begitu ada orang berisik langsung panik dan memanggil rapat, lalu lahir instruksi yang kadang tak perlu. Tuntaskan kasus ini. Copot yang terlibat. Mengangnya, kalau tak ada instruksi, bawahan presiden tak bertindak seperti itu? Enak dong jadi pembantu presiden, bekerja tergantung instruksi.

"Romo," saya menyela, "jaringan Gayus ini sesuatu yang serius karena ada mafianya, wakil rakyat pun membuat pansus dan panja."

Romo terkekeh. "Di negeri yang lucu tapi memprihatinkan ini, semua masalah bisa dijadikan proyek dengan alasan mafia. Ada mafia hukum, mafia pajak, mafia bola, mafia TKI, mafia kebohongan, mafia pornografi...."

"Sudahlah Romo, nyanyian Romo pun seperti asal-asalan juga," kata saya.

Kasus Gayus Bisa Jadi Alat Transaksi Politik

"Semua pihak punya kartunya."

JAKARTA — Sejumlah pengamat politik khawatir kasus mafia pajak dan peradilan yang melibatkan Gayus Halomoan Tambunan bisa dijadikan alat transaksi oleh para politikus. "Kasus ini bisa menjadi alat jegal-menjegal dalam pertarungan partai yang berkuasa," kata Ikrar Nusa Bakti, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dalam diskusi "Setelah Kasus Gayus" di Jakarta kemarin.

Menurut Ikrar, kasus Gayus berpotensi menyulut kekisruhan politik dalam pertarungan politikus partai besar yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Partai Koalisi. Karena itu, ia

mendesak agar semua pihak yang terlibat dalam kasus ini diurus tuntas.

"Enggak akan sampai jatuh negeri ini kalau ada politikus partai, seperti Golkar dan Demokrat, yang kena. Apa itu sampai menghancurkan sistem politik? Saya kira tidak," kata Ikrar.

Menurut pengamat dan peneliti Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muh-tadi, semua partai berkepentingan menjadikan kasus Gayus sebagai alat transaksi politik. "Ini bisa dijadikan sandera karena semua pihak mengatakan punya kartunya," kata Burhanuddin.

Sebagai oposan, PDI Perjuangan, misalnya, kata Burhanuddin, berkepentingan untuk memakai kasus Gayus sebagai amunisi buat menyetub pemberantasan korupsi pada pemerintahan

Susilo Bambang Yudhoyono tak berjalan baik.

Adapun Partai Golkar bisa memakai kasus Gayus sebagai amunisi untuk menyerang balik. "Jadi kasus Gayus ini ibarat satu buku yang bisa dipakai siapa pun untuk memuluskan kepentingan," kata dia.

Burhanuddin merujuk pada sikap Partai Golkar yang mendesak Presiden mengevaluasi Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. "Keberadaan Satgas terbukti banyak mudaratnya," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.

Idrus menuding Satgas mempolitisasi proses hukum. Politikus Golkar ini merujuk pada testimoni Gayus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu lalu. "Ada skenario menyudutkan ketua umum kami seca-

ra sistematis," kata Idrus.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa membantah jika partai itu disebut memakai kasus Gayus sebagai amunisi untuk menekan partai lain dalam Sekretariat Gabungan. "Tidak pernah terpikir oleh kami untuk menjadikan perkara Gayus sebagai amunisi ke partai lain," ujarnya.

Menurut Saan, kasus mafia pajak Gayus sepenuhnya murni masalah hukum. Partai Demokrat tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan meminta penuntasan kasus itu tetap murni di ranah hukum. Soal evaluasi Satgas, Partai Demokrat mengaku setuju hal itu dievaluasi. "Syaratnya hanya untuk perbaikan, bukan pembubaran," ujarnya.

● ISMA SAVITRI | IRIN AGUSTIA | CORNILA DESYANA | WIDIARSI AGUSTINA

"Namanya Bagus, Kirain Gayus..."

Tugas berat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengawasi penanganan kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus H. Tambunan agaknya terganggu di benak Wakil Presiden Boediono. Di Palembang kemarin, Boediono sempat salah dengar dan "keseleo" menyebut nama siswa peserta dialog di SMK Negeri 2 Palembang dengan "Gayus", terpidana kasus mafia pajak.

"Insiden" itu bermula saat Wakil Presiden didaulat menjadi moderator dalam dialog dengan sejumlah perwakilan murid sekolah menengah dan guru se-Sumatera Selatan. Lantaran menjadi moderator, Boediono pun menyerahkan jawaban pertanyaan

sebelumnya, terlalu pelan menyebut nama Galih, Wakil Presiden pun jadi salah dengar. "Siapa namanya? Gayus?" tanya Boediono.

Tiba-tiba salah seorang siswa mengajukan pertanyaan. Galih Bagus Purnama, yang menjadi wakil salah satu sekolah menengah, menanyakan soal pendidikan. Setelah Galih bertanya, Wakil Presiden sempat meminta daftar pertanyaan itu kepada ajudan yang mendampingi.

Mungkin karena Galih tak cukup keras menyebut namanya dan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, yang duduk di

sebelahnya, terlalu pelan menyebut nama Galih, Wakil Presiden pun jadi salah dengar. "Siapa namanya? Gayus?" tanya Boediono.

Tak ayal, bukan hanya mengundang tawa peserta, Boediono pun kena "tegur" halus dari istrinya, Nyonya Herawati Boediono. Nyonya Herawati, yang duduk di samping Boediono, segera mengayunkan tangan kanannya dan "mencolek", seraya bergumam, "*Piye, toh, Pak.*"

Boediono pun akhirnya tertawa. Ia buru-buru meralatnya. "Maaf, maaf, Galih Bagus. Karena tadi sepertinya saya dengar Pak Gubernur seperti menyebut nama Gayus. Oh, ternyata namanya Bagus...."

Boediono sendiri meng-

aku siap menjalankan perintah Presiden: mengawasi penuntasan kasus Gayus. "Saya siap melaksanakan karena itu amanah. Yang penting dilaksanakan sungguh-sungguh, setulus-tulusnya, dan sejujur-jujurnya," kata Wakil Presiden di atas pesawat kepresidenan yang membawa rombongan ke Pangkalpinang kemarin.

Wakil Presiden berjanji akan tetap berpegang penuh pada amanat tugas, salah satunya 12 poin instruksi presiden. "Kalau ada hal-hal yang rumit, tentu akan saya laporkan kepada Presiden," kata Boediono. "Kita semua ini hanya membantu Presiden menjalankan tugasnya sesuai dengan UUD 1945."

● MUNAWWAROH